

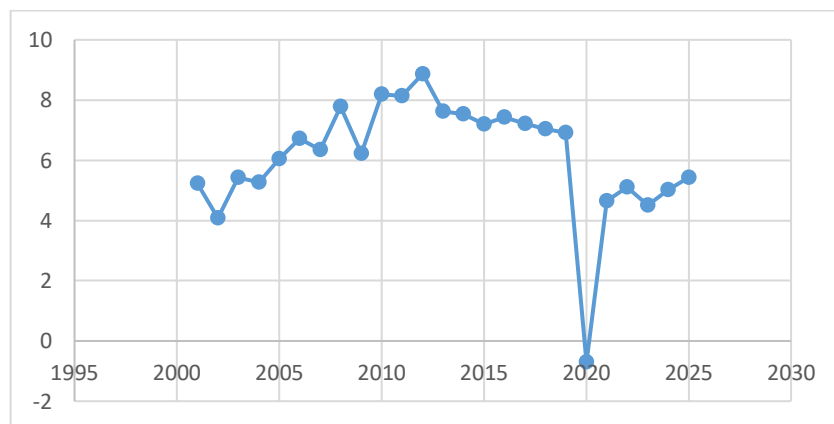
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator makroekonomi yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan regional karena mampu menggambarkan sejauh mana kemampuan suatu wilayah atau daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menghasilkan barang dan jasa, yang tercermin pada kenaikan output dan pendapatan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi daerah karena merepresentasikan total nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi barang dan jasa, atau nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah pada periode tertentu. Oleh karena itu, perubahan PDRB dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk melihat arah perkembangan dan laju pertumbuhan perekonomian daerah.

Gambar 1.1 *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2025 (Persen)*



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Pada periode 2010 hingga 2012, pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu berada di kisaran 8 persen dengan puncaknya terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 8,87 persen. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mulai melambat dan terus mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi di berbagai sektor, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menurun drastis hingga menyentuh angka negatif yakni -0,71 persen. Namun, setelah melewati periode tersebut, pertumbuhan ekonomi kembali berangsur membaik dan menunjukkan peningkatan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditandai oleh kenaikan output secara agregat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi yang berubah dari waktu ke waktu. Temuan empiris pada berbagai wilayah di Indonesia mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sering kali diiringi oleh tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan publik yang saling berinteraksi. Dengan demikian, menjadi hal penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kajian pertumbuhan ekonomi daerah, dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan jangka panjang dan pendekatan permintaan agregat. Sejumlah penelitian empiris di Indonesia mengadopsi kerangka teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan dan teori pertumbuhan ekonomi Keynesian untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekonomi dan kebijakan publik memengaruhi kinerja ekonomi daerah (Kamar, 2014).

Teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan menjelaskan bahwa pertumbuhan output dalam jangka panjang ditentukan oleh akumulasi faktor-faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja, serta kualitas sumber daya manusia. Penelitian yang menggunakan pendekatan Solow-Swan menunjukkan bahwa pembentukan modal dan kualitas pembangunan manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara gangguan terhadap faktor produksi dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi (Wariyanti & Rahmayani, 2025).

Di sisi lain, teori Keynesian memberikan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dari perspektif permintaan agregat. Teori ini menekankan bahwa tingkat output dan kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh besarnya permintaan agregat, yang tidak selalu terbentuk secara otomatis melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, Keynesian menempatkan peran pemerintah sebagai faktor penting dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah, terutama ketika sektor swasta tidak mampu mendorong aktivitas ekonomi secara optimal (Rosul, 2024). Dalam kerangka Keynesian, pengeluaran pemerintah dipandang sebagai instrumen utama untuk menstimulasi permintaan agregat dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah menjadi semakin relevan ketika perekonomian mengalami

perlambatan atau ketidakstabilan, karena mekanisme pasar tidak selalu mampu mengembalikan perekonomian ke kondisi keseimbangan dengan sendirinya (Firda, et al., 2025). Oleh karena itu, fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam jangka pendek dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan permintaan agregat dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kinerja perekonomian daerah mencerminkan hasil dari proses pembangunan ekonomi yang melibatkan berbagai faktor ekonomi dan kebijakan publik. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan terbentuk dari beberapa faktor seperti akumulasi modal, interaksi kondisi pasar tenaga kerja, aktivitas ekonomi produktif, kualitas pembangunan manusia, serta peran pemerintah daerah dalam perekonomian.

Dalam konteks ketenagakerjaan, keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas produksi dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan nilai tambah regional. Kesempatan kerja menggambarkan jumlah penduduk yang bekerja atau banyaknya tenaga kerja yang terlibat aktif dalam proses produksi. Semakin besar jumlah penduduk yang bekerja, semakin besar pula kontribusinya terhadap pembentukan output. Sari & Fisabilillah (2021), dalam kajiannya terhadap perekonomian daerah, menemukan bahwa peran tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara parsial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat produktivitas dan struktur ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk bekerja belum tentu diikuti oleh peningkatan output daerah apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Aktivitas penanaman modal atau investasi sering dikaitkan dengan peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman modal atau investasi memungkinkan terjadinya peningkatan kapasitas produksi serta peningkatan teknologi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Kamar (2014), dampak investasi terhadap kinerja ekonomi daerah sangat bergantung pada kondisi struktural dan kemampuan daerah dalam mengelola arus modal tersebut. Dalam beberapa konteks, investasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pada kondisi lain pengaruhnya relatif terbatas.

Selain faktor ekonomi riil, kualitas pembangunan manusia juga menjadi perhatian penting dalam kajian pertumbuhan ekonomi daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah melalui dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat berpotensi meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhidin, et al (2024) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki keterkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun melalui mekanisme peningkatan kualitas tenaga kerja.

Peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga tercermin melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat berfungsi sebagai stimulus bagi aktivitas ekonomi daerah, khususnya melalui penyediaan layanan publik dan infrastruktur. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka

semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah. Namun, hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan variasi. Pada beberapa daerah, pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pada daerah lain pengaruhnya sangat bergantung pada efektivitas alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang saling berkaitan. Variasi temuan empiris yang muncul menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor tersebut dan pertumbuhan ekonomi bersifat kontekstual serta dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi arah dan signifikansi pengaruhnya tidak selalu konsisten. Sari & Fisabilillah (2021) menemukan bahwa jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianto & Mukhtar (2022) yang menemukan bahwa tenaga kerja dalam penelitian ini digambarkan dengan jumlah penduduk bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada konteks wilayah dan periode yang berbeda. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat universal dan sangat bergantung

pada struktur sektor ekonomi serta produktivitas tenaga kerja di masing-masing wilayah.

Hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan variasi temuan empiris. Antari, et al (2025) menemukan bahwa investasi baik PMDN maupun PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Rawung, et al (2022) menemukan bahwa investasi, termasuk PMDN dan PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Puspitasari, et al (2024) juga menunjukkan hasil bahwa investasi khususnya PMA tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama ketika realisasi investasi belum mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Temuan serupa juga terlihat pada beberapa studi sektoral yang menunjukkan bahwa investasi baru berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh konteks wilayah, sektor penerima investasi, dan periode analisis.

Pada aspek pembangunan manusia, sejumlah penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia dan kinerja ekonomi daerah. Muhidin, et al (2024) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian Simarmata & Iskandar (2022) menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks pembangunan Manusia bersifat dua arah dan tidak selalu langsung, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi antarwilayah dan waktu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia tidak selalu segera tercermin dalam peningkatan

output ekonomi daerah. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada tingkat pembangunan dan periode pengamatan yang digunakan.

Temuan yang tidak seragam juga terlihat pada kajian mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ihsani, et al (2024) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Istianto, et al (2021) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Rahmalia, et al (2024) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah justru tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa peran pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada efektivitas alokasi anggaran, komposisi belanja, serta prioritas pembangunan daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan temuan, baik dari sisi arah maupun signifikansi pengaruh variabel kesempatan kerja, investasi, Indeks Pembangunan Manusia dan pengeluaran pemerintah. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah serta periode pengamatan yang digunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Kesempatan Kerja,**

Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesempatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah investasi (PMA) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah literatur mengenai pengaruh kesempatan kerja, Investasi (PMA), Indeks Pembangunan Manusia dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai referensi ataupun rujukan bagi penulis dan peneliti yang melakukan penelitian sejenis maupun pengembangan penelitian ekonomi lainnya.
3. Bagi pemerintah daerah: memberikan gambaran empiris sebagai bahan perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu fenomena yang menunjukkan peningkatan output atau pendapatan nasional secara agregat, yaitu total produksi atau total pendapatan yang dihasilkan suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipahami sebagai peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menggambarkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, tetapi juga mencerminkan semakin kuatnya kemampuan perekonomian dalam menyediakan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara berkelanjutan dari waktu ke waktu (Rahmalia, et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan output atau produksi barang dan jasa, pendapatan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terdapat dua teori utama (*grand theory*) yang sering digunakan untuk menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi,

yaitu teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan dan teori pertumbuhan ekonomi Keynesian.

Teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan pertama kali dikembangkan oleh Robert M. Solow dan Trevor W. Swan pada tahun 1956. Teori ini menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peran faktor-faktor produksi utama, yaitu modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal yang diperoleh melalui investasi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan cara menambah stok modal. Akumulasi modal tersebut meliputi berbagai bentuk investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan produksi, pengembangan sumber daya manusia, serta aset fisik lainnya. Peningkatan stok modal melalui investasi pada aset fisik akan memperbesar kemampuan produksi dan mendorong peningkatan output secara menyeluruh (Amalia, et al., 2016; Pamungkas & Hayati, 2023). Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan Todaro & Smith (2015) yang menyatakan bahwa tingkat penanaman modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan investasi pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam teori Solow-Swan adalah tenaga kerja. Kesempatan kerja yang diukur melalui jumlah penduduk yang sedang bekerja mencerminkan penggunaan faktor tenaga kerja yang berkontribusi secara langsung dalam proses produksi. Meningkatnya jumlah penduduk bekerja menandakan semakin banyak tenaga kerja yang aktif terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga kapasitas produksi meningkat dan proses produksi terdorong. Namun, kontribusi tersebut bergantung pada kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang paling umum digunakan untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mendorong kegiatan produksi lebih baik lagi, sehingga peningkatan IPM berpengaruh terhadap kemampuan tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitasnya. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin besar pula output yang dapat dihasilkan, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, tenaga kerja menjadi sumber daya yang potensial sebagai penggerak perekonomian. Selain itu, tenaga kerja dengan produktivitas tinggi dan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik juga akan mampu memanfaatkan teknologi secara lebih efektif, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Vikia, 2023; Wariyanti & Rahmayani, 2025).

Selain akumulasi modal, tenaga kerja dan teknologi, terdapat faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah. Teori pertumbuhan ekonomi Keynesian pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 dalam karyanya "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" yang menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dan permintaan agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Fatmawati, et al., 2025). Menurut pandangan Keynesian, pengeluaran pemerintah diposisikan sebagai variabel eksogen yang dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan perekonomian, khususnya ketika terjadi perlambatan atau ketidakstabilan ekonomi. Keynes menekankan bahwa ketika permintaan agregat mengalami penurunan, pemerintah perlu melakukan intervensi aktif melalui kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja negara pada barang dan jasa publik. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong konsumsi dan investasi sektor

swasta sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan output serta penyerapan tenaga kerja. Dalam situasi ketika sektor swasta belum mampu menyediakan investasi yang memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen utama dalam memulihkan aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian. Selain berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, pengeluaran pemerintah juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Menurut Keynes, peningkatan belanja publik dapat memperkuat daya beli masyarakat, yang selanjutnya mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Alokasi anggaran pemerintah pada sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Lakat, et al., 2025).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai kinerja dan keberhasilan pembangunan, karena menunjukkan kemampuan suatu wilayah atau negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tingkat daerah, salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemilihan Produk Domestik Regional Bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perannya yang mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan produksi dalam suatu daerah. Dengan demikian, peningkatan PDRB menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang diikuti oleh meningkatnya balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi tersebut (Tarigan, 2008; Adisasmita, 2001, dalam Liow, et

al., 2022). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) umumnya dianalisis dalam rentang waktu tertentu untuk melihat perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah. Perubahan tingkat output dinilai dalam satuan moneter yang tercermin melalui nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan kondisi meningkatnya nilai PDRB suatu daerah dari waktu ke waktu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila aktivitas ekonominya pada periode berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tercapai apabila terjadi peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, yang selanjutnya tercermin dalam meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Adapun definisi PDRB menurut (Sukirno, 1994) merupakan keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah tanpa membedakan kepemilikan faktor produksinya, baik yang dimiliki oleh penduduk setempat maupun oleh penduduk dari wilayah lain. PDRB digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dari perkembangan aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Selain itu, PDRB juga berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah serta menjadi dasar dalam perumusan dan penentuan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang (Kairupan, 2013). PDRB dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan harga, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku umumnya digunakan untuk menganalisis perubahan

atau pergeseran struktur perekonomian, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau daerah pada periode waktu tertentu. Nilai tersebut juga dapat dipandang sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun. Adapun perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran (Mudji & Taripar, 2018).

1. Pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu, umumnya satu tahun. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara nilai output dengan input antara yang digunakan dalam proses produksi.
2. Pendekatan pendapatan, di mana PDRB dihitung berdasarkan total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan produksi di suatu daerah selama periode tertentu. Balas jasa tersebut meliputi upah dan gaji sebagai imbalan tenaga kerja, sewa sebagai balas jasa tanah, bunga sebagai balas jasa modal, serta keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan, yang seluruhnya dihitung sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh komponen permintaan akhir dalam suatu wilayah. Komponen tersebut meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, serta ekspor neto.

2.1.3 Kesempatan Kerja

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB tidak dapat dilepaskan dari peran tenaga kerja sebagai faktor produksi utama yang berperan aktif dalam mengendalikan serta mengelola sistem ekonomi, serta turut memengaruhi aktivitas produksi, konsumsi, distribusi, maupun investasi dalam suatu perekonomian (Haydarsyah & Nilasari, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, tenaga kerja merupakan seseorang yang memanfaatkan kemampuan dan keterampilannya dalam bidang tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa, dengan tujuan meningkatkan produktivitas serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil produksi dalam jangka waktu tertentu (Rahmadia, 2024).

Tenaga kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan usia menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk berusia antara 15 hingga 64 tahun, yaitu kelompok usia produktif yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Sementara itu, yang tergolong bukan tenaga kerja adalah penduduk di luar rentang usia tersebut, yakni mereka yang berusia di

bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun, seperti anak-anak, lanjut usia dan para pensiunan yang umumnya tidak lagi aktif dalam kegiatan ekonomi. Tenaga kerja juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia produktif yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan namun bersifat tidak tetap, sedang aktif mencari pekerjaan, atau berada dalam kondisi menganggur. Sementara itu, bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia produktif yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan aktivitas lain di luar pekerjaan produktif (Adianto & Fedryansyah, 2018).

Klasifikasi tenaga kerja ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menunjukkan adanya perbedaan tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan kesempatan kerja yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja sehingga tenaga kerja dapat terserap dan berperan dalam kegiatan produksi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kesempatan kerja sebagai jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam kegiatan bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama. Konsep kesempatan kerja merupakan terjemahan dari istilah *employment*, yang merujuk pada jumlah individu yang bekerja tanpa memperhitungkan banyaknya pekerjaan yang dimiliki oleh setiap individu, tingkat pendapatan, maupun jumlah jam kerja yang dilakukan (Widada, et al., 2014).

Kesempatan kerja (*employment*) dapat dipahami sebagai peluang kerja yang muncul seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu

daerah, di mana peluang tersebut dapat berada dalam kondisi telah terisi maupun masih tersedia. Awandari & Indrajaya (2016) menjelaskan bahwa kesempatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang telah bekerja atau berhasil memperoleh pekerjaan, sehingga semakin besar jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan semakin luasnya kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya memungkinkan penduduk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kesempatan kerja dapat juga didefinisikan sebagai banyaknya penduduk yang dapat terserap untuk bekerja atau banyaknya tenaga kerja yang gunakan suatu perusahaan, instansi, atau sektor usaha. Kesempatan kerja akan mampu menampung seluruh tenaga kerja apabila jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia berada dalam kondisi seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan sendiri diartikan sebagai bidang kegiatan usaha atau instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja. Dengan demikian, indikator kesempatan kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja serta banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dalam suatu daerah (Tambunan, 2001; Sadono, 2007, dalam Tussa'diah, 2019).

2.1.4 Investasi

Dalam kerangka teori ekonomi, akumulasi modal dipandang sebagai bentuk investasi yang dikenal pula sebagai penanaman modal. Sukirno (2004) mendefinisikan investasi sebagai kegiatan membeli barang-barang modal dan peralatan produksi, baik untuk menggantikan maupun menambah stok modal yang ada dalam perekonomian. Barang modal dan peralatan produksi tersebut

selanjutnya digunakan dalam proses produksi barang dan jasa pada periode mendatang. Dengan demikian, dalam teori ekonomi, investasi dipahami sebagai kegiatan pengeluaran yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi guna menghasilkan produk dan layanan dalam perekonomian. Investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produktif perekonomian sehingga mampu mendorong peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan pada akhirnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Maulidiya & Seputra, 2019; Alifia & Khusaini, 2024). Selain itu, investasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan disertai harapan memperoleh keuntungan, di mana nilai modal yang ditanamkan tersebut cenderung mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

Investasi atau penanaman modal terbagi menjadi dua sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun modal asing yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut: (1) Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, telah memperoleh persetujuan pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan perusahaan di Indonesia; (2) Peralatan perusahaan, termasuk hasil penemuan dari pihak asing serta bahan-bahan yang didatangkan dari luar wilayah Indonesia, selama tidak dibiayai melalui kekayaan devisa Indonesia; dan (3) Bagian dari hasil keuntungan perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk ditransfer, namun dimanfaatkan kembali sebagai pembiayaan kegiatan usaha di Indonesia (Jufrida, 2016).

Dalam kajian ekonomi, penanaman modal asing juga dipahami melalui pendekatan konseptual yang lebih luas. Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi asing dipahami sebagai aliran modal yang berasal dari pihak luar negeri dan diarahkan ke sektor investasi di negara penerima. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan penanaman modal asing sebagai investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara terhadap perusahaan di negara lain dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan di negara tujuan tersebut (Arifin, et al., 2008, dalam Fadilah, 2017). Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara dengan menempatkan modal pada perusahaan di negara lain. Dalam kegiatan tersebut, negara asal perusahaan penanam modal disebut sebagai *home country*, sedangkan negara tujuan disebut sebagai *host country* (Igamo, 2015).

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, investasi asing dianggap memiliki peranan penting. Peningkatan investasi asing dinilai lebih mampu menjamin keberlanjutan proses pembangunan karena bersifat jangka panjang dan produktif. Investasi asing juga memiliki sejumlah keunggulan, antara lain memperkenalkan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem organisasi yang lebih maju ke negara berkembang. Selain itu, investasi asing juga dapat mendorong perusahaan domestik untuk meningkatkan kegiatan investasinya, baik melalui pengembangan industri pendukung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan asing, sehingga turut mendukung peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2012, dalam Sustari & Sayuti, 2022).

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. Konsep ini pada awalnya diajukan sebagai pendekatan baru dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia melalui suatu indikator yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak diperkenalkan, IPM digunakan oleh UNDP sebagai alat ukur yang sederhana dan terpadu karena dinilai mampu merepresentasikan kualitas hidup serta kinerja pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan sejauh mana penduduk mampu mengakses dan menikmati hasil-hasil pembangunan, terutama dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, serta berbagai dimensi kesejahteraan lainnya (Shobri, et al., 2022). Pengukuran IPM bertujuan untuk menilai perkembangan potensi, keterampilan, serta kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, IPM

sangat cocok digunakan untuk menilai capaian pembangunan manusia yang dilakukan oleh suatu wilayah atau daerah dalam periode waktu tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas berbagai pilihan yang dimiliki oleh penduduk. Dalam kerangka tersebut, penduduk diposisikan sebagai tujuan akhir pembangunan, sementara berbagai aktivitas dan kebijakan pembangunan dipandang sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai alat ukur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu umur panjang dan sehat sebagai indikator kesehatan, tingkat pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pendidikan diukur melalui indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar hidup layak diukur melalui rata-rata pengeluaran per kapita yang mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan dasar (Siswati & Hermawati, 2018; Bastianingrum, 2023).

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia yang menjadi landasan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada empat komponen utama, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Keempat komponen tersebut merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam pembangunan manusia yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian pembangunan. Melalui penerapan keempat prinsip ini, pembangunan manusia diarahkan untuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun penjelasan dari keempat komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas (*productivity*), menekankan bahwa individu harus mampu meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya serta berpartisipasi secara penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan kesempatan kerja. Pembangunan manusia diharapkan dapat menjadikan individu sebagai pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan.
2. Pemerataan (*equity*), mengandung prinsip bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Pembangunan manusia menekankan pentingnya penghapusan berbagai hambatan yang menyebabkan ketimpangan antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat.
3. Kestinambungan atau keberlanjutan (*sustainability*), menegaskan bahwa capaian pembangunan manusia harus dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, proses pembangunan tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam mencapai kualitas hidup yang layak.
4. Pemberdayaan (*empowerment*), menekankan pentingnya peran aktif individu dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada

hasil akhir, tetapi juga pada kemampuan individu untuk berpartisipasi dan memiliki kendali terhadap proses pembangunan.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah, pemerintah berperan dalam penyediaan barang dan jasa publik, pelaksanaan program pembangunan, serta pengaturan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Mangkoesoebroto (1998) dalam Sitaniapessy (2013), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana setiap keputusan pemerintah untuk melakukan pembelian barang dan jasa akan menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, besarnya pengeluaran pemerintah menunjukkan tingkat komitmen pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang telah direncanakan. Dalam pengertian riil, pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur besarnya aktivitas pemerintah yang dibiayai melalui pengeluaran pemerintah. Semakin banyak dan semakin luas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan alokasi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan dalam menjalankan dan mengelola perekonomian. Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana belanja daerah menjadi komponen utama yang digunakan pemerintah daerah

untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik. Halim (2007) dalam Iqbal, et al (2020) mendefinisikan belanja daerah sebagai bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat serta kepada pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi. Pengeluaran ini dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyediaan pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal, dengan tujuan menambah aset tetap atau inventaris serta memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Zulvan & Purbasari, 2024). Sementara itu, Halim (2004) dalam Nuzana & Riharjo (2016) mendefinisikan belanja modal sebagai belanja pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, dan dapat meningkatkan aset serta kekayaan daerah, yang pada tahap selanjutnya akan menambah kebutuhan belanja rutin. Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mendukung kelancaran berbagai aktivitas ekonomi. Melalui penyediaan dan pembangunan aset seperti infrastruktur, peralatan, maupun fasilitas umum, belanja modal diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan pemerintah, mempermudah mobilitas dan distribusi, serta mendorong produktivitas. Dengan demikian, belanja modal berperan dalam memperlancar roda perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan

bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Adapun indikator variabel belanja modal diukur dengan: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap lainnya.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kesempatan kerja yang diukur berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja atau tenaga kerja yang aktif bekerja menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, karena peningkatan aktivitas perekonomian akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Semakin besar kesempatan kerja yang tersedia, menandakan semakin banyaknya penduduk yang terserap dan aktif bekerja dalam proses produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang terserap atau jumlah penduduk yang aktif bekerja, serta tingkat produktivitasnya, yang pada akhirnya mendorong peningkatan output ekonomi dan kinerja perekonomian daerah (Hanum, et al., 2022).

Secara teoritis, bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja atau pekerja yang aktif dalam proses produksi akan meningkatkan jumlah output yang diproduksi. Peningkatan output tersebut berpotensi menambah nilai tambah sektor-sektor ekonomi dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja ekonomi daerah. Simanjuntak & Jan (2005)

dalam Widodo & Setiawati (2025) menyatakan bahwa pekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi berkontribusi dalam penciptaan barang dan jasa di suatu wilayah. Bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja, khususnya pekerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai akan meningkatkan kapasitas produksi daerah dan berpotensi mendorong peningkatan output ekonomi. Semakin banyak pekerja yang aktif terlibat dalam proses produksi, semakin besar pula nilai barang dan jasa yang dihasilkan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Solow-Swan yang menekankan peran tenaga kerja sebagai faktor produksi utama dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Hubungan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh temuan empiris Julianto & Mukhtar (2022) yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang bekerja dan turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin besar pula output ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Pryogo & Rosalia (2025) juga menemukan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menandakan banyaknya jumlah tenaga kerja yang aktif dalam proses produksi berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja yang diukur berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.2 Hubungan Investasi (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat negara maupun daerah. Investasi pada dasarnya merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Bertambahnya stok modal dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga output yang dihasilkan suatu daerah juga cenderung meningkat. Dalam teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, salah satu faktor produksi utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi adalah modal. Akumulasi modal yang diperoleh melalui investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah stok modal (*capital stock*) dalam periode tertentu. Ketika stok modal meningkat, kapasitas produksi ikut meningkat sehingga output total perekonomian terdorong naik. Kenaikan output tersebut pada tingkat daerah tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, yakni meningkatnya aktivitas dan nilai tambah produksi yang dihasilkan seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah (Maisaroh & Risyanto, 2018).

Salah satu bentuk investasi yang dapat digunakan untuk menambah stok modal adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat memperkuat pembentukan modal dan mendorong pertumbuhan output daerah. PMA dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, juga berpotensi memperbaiki standar hidup masyarakat. Peningkatan PMA akan menambah stok modal sehingga aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerah dapat berkembang. PMA juga berperan dalam pengadaan alat-alat produksi yang akan mendukung proses produksi di periode-

periode berikutnya serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi.

Temuan penelitian terdahulu turut memperkuat adanya hubungan positif antara PMA terhadap PDRB. Penelitian Trisniani & Sugianto (2025) menemukan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya kontribusi PMA terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masuknya PMA akan meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah daerah yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain dilakukan oleh Antari, et al (2025) yang juga menemukan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu daerah. Budihardjo, et al (2020) menjelaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya dilihat dari besaran pendapatan atau output yang dihasilkan, tetapi juga mencakup aspek harapan hidup, pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas agar dapat berperan penting dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga tenaga kerja tidak hanya bertambah dari sisi kuantitas, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas dan produktivitasnya.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, serta perkembangan teknologi yang meningkatkan produktivitas. Kontribusi tenaga kerja terhadap aktivitas produksi pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi juga oleh kualitas dan tingkat produktivitasnya. Constantini & Salcatore dalam Prameswari, et al (2021) menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan sumber daya manusia akan berdampak pada peningkatan ekonomi, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian. Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika kualitas SDM membaik, aktivitas produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan IPM berkaitan dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja dalam mewujudkan kinerja yang lebih produktif. Produktivitas tenaga kerja yang semakin tinggi akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan output, yang pada tingkat daerah ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh temuan empiris Bastianingrum (2023) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan kualitas sumber daya manusia pada dimensi kesehatan, pendidikan dan daya beli. Perbaikan kualitas sumber daya manusia tersebut akan memperkuat produktivitas tenaga kerja sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Muhidin, et al (2024) yang juga menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua hasil penelitian

tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara IPM dan pertumbuhan ekonomi. Ketika IPM meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat. Hal ini didukung oleh kualitas tenaga kerja yang semakin membaik sehingga meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.

2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu adanya peran pemerintah untuk mendukung pencapaian pertumbuhan jangka panjang. Peran tersebut dijalankan melalui kebijakan fiskal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan sekaligus memperkuat aktivitas perekonomian agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, baik melalui penyediaan layanan publik maupun melalui program-program yang memperkuat kapasitas perekonomian. Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja pemerintah pada barang dan jasa publik. Alokasi anggaran atau belanja pemerintah pada sektor-sektor publik seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Lakat, et al., 2025).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang dinilai paling efektif dalam mendorong aktivitas perekonomian. Wibisono (2003) dalam Pateda, et al (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak lepas dari peran pengeluaran pemerintah terutama melalui penyediaan layanan sektor publik. Pengeluaran pemerintah pada tingkat daerah tercermin dalam APBD, dengan belanja modal sebagai salah satu komponen yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai aktivitas perekonomian.

Semakin besar porsi belanja modal yang dialokasikan secara produktif, maka semakin besar pula peluang peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh maupun meningkatkan aset tetap. Peningkatan aset tersebut diperkirakan mampu memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja perekonomian daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila pengeluaran pemerintah daerah, khususnya belanja modal, dialokasikan pada sektor-sektor yang bersifat produktif. Melalui belanja modal, pemerintah dapat mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi, serta inovasi dalam kegiatan produksi. Dampaknya, dalam jangka panjang belanja modal berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan memperluas peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat (Aulia, et al., 2024).

Temuan penelitian terdahulu turut memperkuat adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Istianto, et al (2021) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berupa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal memiliki peran penting dalam penyediaan barang dan jasa publik. Jika belanja modal lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, konektivitas daerah akan meningkat sehingga aktivitas ekonomi lebih lancar dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aulia, et al (2024) yang juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Tinjauan Empiris

Julianto & Mukhtar (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Jumlah Penduduk yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan variabel independen investasi dan jumlah penduduk yang bekerja, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat baik secara simultan maupun parsial.

Prayogo & Rosalia (2025) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan variabel independen investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah penduduk dan rata-rata lama sekolah, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta.

Trisniani & Sugianto (2025) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PMA, PMDN, PAD dan TPT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian ini menggunakan variabel independen Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PMDN dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Antari, et al (2025) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Penelitian ini menggunakan variabel independen PMA dan PMDN, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik PMA maupun PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bastianingrum (2023) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh IPM, Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten". Penelitian ini menggunakan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan dan pendidikan, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel tingkat kemiskinan dan pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Banten.

Muhidin, et al (2024) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2023". Penelitian ini menggunakan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Istianto, et al (2021) melakukan penelitian dengan judul " Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Bolaang Mongondwo Raya". Penelitian ini menggunakan variabel independen belanja modal dan IPM, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja

modal dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Bolaang Mongondow Raya.

Aulia, et al (2024) melakukan penelitian dengan judul "Pertumbuhan Ekonomi: Ditinjau dari Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah". Penelitian ini menggunakan variabel independen belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja modal, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja kesehatan dan belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

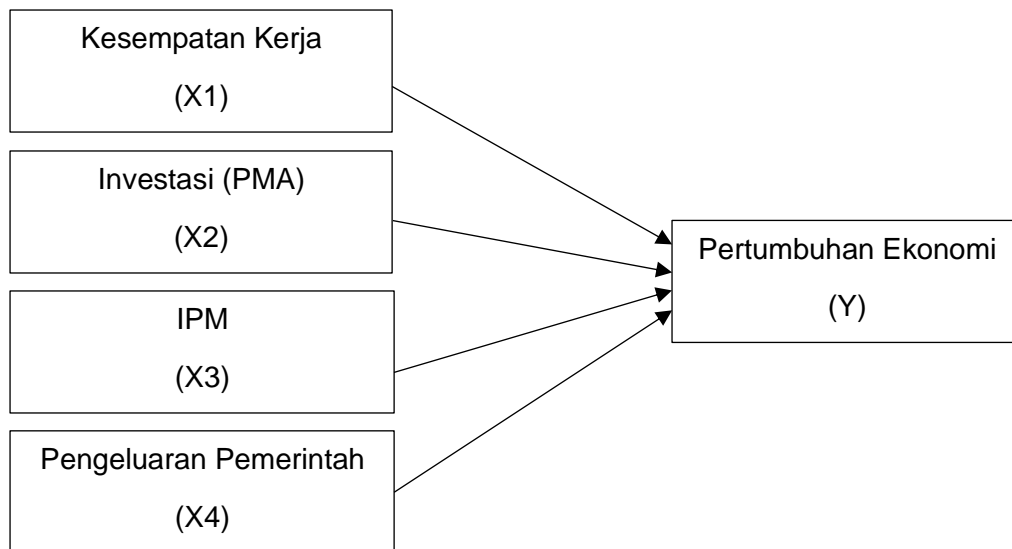
Patricia, et al (2025) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat". Penelitian ini menggunakan variabel independen IPM, UMR, PMA dan pertumbuhan penduduk, serta variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel UMR dan pertumbuhan penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kesempatan kerja yang tercermin dalam jumlah penduduk bekerja menunjukkan keterlibatan penduduk atau tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Ketika jumlah penduduk bekerja meningkat, proses produksi cenderung lebih

intensif sehingga kapasitas produksi bertambah dan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Peningkatan output daerah juga ditentukan oleh akumulasi modal melalui investasi. Investasi dipahami sebagai pengeluaran untuk memperoleh barang modal dan peralatan produksi guna menambah kapasitas produksi pada periode berikutnya. Salah satu bentuk investasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi ialah Penanaman Modal Asing (PMA). Masuknya PMA tidak hanya menambah ketersediaan modal dan sarana produksi, tetapi juga berpotensi membawa manfaat berupa transfer pengetahuan dan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain modal fisik, kapasitas produksi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. IPM digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja. Tingginya nilai IPM menunjukkan semakin baik kualitas tenaga kerja yang tersedia dan semakin tinggi produktivitasnya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Lebih lanjut, peran pemerintah juga merupakan faktor penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal digunakan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik serta program pembangunan. Adanya kebijakan tersebut dapat memicu peningkatan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang kuat serta didukung oleh peningkatan output berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun kerangka konseptual yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

1. Diduga kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga investasi (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.